PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK BSI TBK KC PADANG

Vira Mardatillah, Romi Susanto

Akademi Keuangan Dan Perbankan “Pembangunan” AKBP Padang

viramardhatillah17@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the mudharabah financing procedure carried out by PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KC Padang. In analyzing the data, the writer uses qualitative data analysis method as a method that describes descriptively about the mudharabah financing procedure at PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KC Padang. The results of this study there are several stages of the Mudharabah Financing Procedure at Bank Syariah Indonesia, namely the submission of an application for mudharabah financing, analysis of mudharabah financing, the decision to apply for mudharabah financing is divided into two decisions, namely the financing decision is accepted and the financing decision is rejected, if the financing decision is accepted or rejected, it is submitted in writing. by providing clear and wise reasons, then the mudharabah financing agreement, the disbursement of the mudharabah financing, the supervision of the mudharabah financing and the return of the mudharabah financing.

Keywords: *Mudharabah Financing Procedure*

PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini perbankan semakin banyak pilihan karena adanya bank syariah dengan penawaran produk keuangan dan investasi dengan cara berbeda dibandingkan bank konvensional yang sebelumnya sudah ada, karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim. Hadirnya bank syariah menjadi keinginan banyak orang sebelum Indonesia merdeka, karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dan jelas perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati.

Ditahun 1983 Indonesia berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam ber kredit yang menjadi konsep dari perbankan syariah. Saat itu kondisi perbankan Indonesia mengalami penurunan karena Bank Indonesia tidak mampu mengendalikan tingkat suku bunga di bank-bank yang membubung tinggi, yang membuat pemerintah menerbitkan deregulasi tanggal 1 Juni 1983 yang memungkinkan bank mengambil keuntungan dari bagi hasil sistem kredit.

Dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 yang membahas tentang Perbankan Syariah dan PP RI No. 72 tahun 1992 yaitu bank berdasarkan prinsip bagi hasil serta keluarnya fatwa bunga haram dari majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003. Banyak bank telah menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya dengan diperkenalkannya prinsip bagi hasil bagi bank, sistem perbankan Indonesia selain bank umum, bank juga dapat memilih untuk menjalankan bisnis berdasarkan prinsip bagi hasil.(Stie et al., 2008)

Mudharabah merupakan suatu bentuk persekutuan yang terdiri dari dua bagian atau lebih dimana pemilik modal (shahibulmaal) menitipkan sejumlah modalnya kepada pengelola (mudharib) dengan kesepakatan terlebih dahulu. Kerja sama ini mengikut sertakan 100% modal yang berasal dari pemilik modal dan keahlian yang dimiliki dari pengelola. Sedangkan untuk pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu: riset perpustakaan (*Library Reserach*) Yaitu penelitian dilakukan degan cara mempelajari buku-buku ilmiah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pembahasan yang dilakukan dan Riset Lapangan (*Field Research*) Yaitu penelitian yang mendapatkan data dengan wawancara pihak-pihak yang berperan langsung dalam perusahaan yang bersangkutan.

Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan Analisa data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menjelaskan secara deskriptif mengenai prosedur pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Padang. Metode Analisa ditinjau dari dua segi yaitu berdasarkan teori dan praktik yang perlu dipertemukan sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaanya, apakah perbedaan yang timbul menyangkut prinsip dasar konsep itu sendiri. Dengan menganalisis perbandingan, pertanyaan tersebut akan terjawab dan hasil Analisa itu dipergunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan dan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diartikan sebagai suatu badan usaha yang mengangkat taraf hidup masyarakat dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat secara kredit atau lainnya. Bank dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sehingga dalam menjalankan usahanya bank dibagi kembali menjadi dua, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. (Sari & Susanto, 2020)

1. Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah di mana dalam kegiatannya bank memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara biasa atau berdasarkan prinsip syariah, dimana dalam menjalankan kegiatannya tidak menyediakan jasa transaksi pembayaran.

Fungsi Bank

Fungsi bank pada umumnya berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat sebagai perantara keuangan.

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso (2006:9) fungsi bank terdiri dari:

- a. *Agent of trust* (Jasa Keuangan)
- b. *Agent of development* (Jasa Untuk Pembangunan)
- c. *Agent of service* (Jasa Pelayanan)

Jenis-jenis Bank

- a. Dilihat dari Fungsi, bank dibagi menjadi: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Dilihat dari Kepemilikannya, bank dibagi menjadi: Bank Milik Pemerintah, Bank Milik Swasta Nasional, Bank Milik Asing dan Bank Campuran.
- c. Dilihat dari Status, bank dibagi menjadi: Bank Devisa dan Bank Non Devisa.
- d. Dilihat dari Cara Menentukan Harga, bank dibagi menjadi: Bank berdasarkan Prinsip Konvensional dan Bank berdasarkan Prinsip Syariah.

Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara bank sebagai pemilik dana (*shahibulmaal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang memiliki kemampuan atau keterampilan dalam mengelola usaha yang bernilai dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati. (Bishnoi & Devi, 2017).

Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

- a. Besarnya modal yang diberikan kepada nasabah harus diserahkan secara tunai dan dapat berupa uang atau produk yang jumlahnya dapat dinyatakan dalam satuan uang.
- b. Hasil kinerja didistribusikan sesuai kesepakatan dalam kontrak sesuai dengan waktu yang disepakati. Bank sebagai pemilik modal akan menanggung seluruh kerugian, kecuali kerugian akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak nasabah.
- c. Bank memiliki hak dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan nasabah, namun bank tidak memiliki hak ikut campur dalam urusan usaha/pekerjaan nasabah tersebut. (Rahman, 2011)

Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah

Gambar 1
Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah

Sumber: PT. Bank BSI Padang

Pengajuan Permohonan Pembiayaan Mudharabah

Setiap permohonan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia, Tbk KC Padang harus diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir Surat Keterangan Permohonan Pembiayaan (SKPP) yang telah disediakan dan melengkapi data yang diperlukan untuk bahan penilaian. (Widayati & Putri, 2019)

Permohonan pembiayaan akan disetujui apabila nasabah memenuhi syarat – syarat pembiayaan Mudharabah yang dinyatakan layak jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha yang dijalankan nasabah sesuai dengan pasar dan sasaran yang telah ditetapkan BSI Cabang Padang, yaitu:
 1. Tidak masuk ke dalam daftar hitam Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.

2. Merupakan jenis usaha yang tidak dilarang dan dihindari untuk dibiayai.

- b Usaha nasabah tidak termasuk dalam jenis usaha pemberian pembiayaan yang perlu dihindari yang bersifat spekulatif atau mempunyai risiko tinggi.
- c Tidak melewati Batas Maksimum Pembiayaan.

Jika manajer akun dan manajer cabang telah menentukan bahwa permintaan pendanaan mudharabah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut, manajer akun akan menghubungi calon mudharib untuk menentukan kapan peninjauan akan dilakukan langsung di perusahaan penjamin. Jenis-jenis Jaminan Pembiayaan Mudharabah antara lain: (Widayati & Maiwati, 2019)

- a Jaminan Materil
- b Jaminan Immateril

Setelah diadakan peninjauan lokasi, maka *account officer* membuat laporan analisis pembiayaan, laporan data hasil kunjungan, laporan hasil peninjauan agunan tanah/kios/kendaraan, dan laporan analisis rasio keuangan calon mudharib. Laporan ini menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah permintaan pendanaan memenuhi persyaratan pendanaan dari pejabat pemutus.

Analisis Pembiayaan Mudharabah

Analisis yang digunakan oleh Bank BSI Tbk KC Padang adalah analisis 5 C yaitu: (Putra & Susanto, 2018)

- a. Analisis Watak (*Character*)

Character adalah keadaan watak/sifat dari calon *mudharib*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.

- b. Analisis Kemampuan (*Capacity*)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh laba yang diharapkan.

- c. Analisis Modal (*Capital*)

Capital adalah jumlah dana/modal ekuitas yang dimiliki oleh calon *mudharib*.

- d. Analisis Kondisi dan Prospek Usaha (*Condition Of Economy*)

Condition of economy adalah situasi kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi yang mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan *mudharib* pada suatu saat.

- e. Analisis Agunan (*Collateral*)

Collateral adalah unsur yang diberikan kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima bank.

Analisis yang harus diperhatikan dari analisis 5 C adalah karakter, apabila calon penerima pembiayaan dianggap memiliki karakter yang buruk namun memiliki penghasilan yang cukup, maka permohonan pembiayaan akan di tolak.

Keputusan Permohonan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil analisis, setelah melalui proses pengajuan pembiayaan, pejabat bank akan memberikan pendapat atas diterima atau ditolaknya keputusan

pembiayaan tersebut. Jika disetujui, akan dibuat surat konfirmasi atau persetujuan dan jika ditolak, surat penolakan akan ditulis oleh bagian administrasi pembiayaan.

Akad Pembiayaan Mudharabah

Akad dilaksanakan setelah pihak bank menyetujui permohonan yang diajukan calon nasabah. Kemudian pihak bank memberikan surat pengesahan disetujui dan dilakukan ijab kabul yang berisi persyaratan tertulis antara pihak bank dengan nasabah yang sudah disepakati. Setelah menyetujui perjanjian, maka antara pihak nasabah dengan bank harus menyepakati pembagian keuntungan yang mana keuntungan dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.

Pencairan Pembiayaan Mudharabah

Setelah dilakukannya ijab kabul maka langkah terakhir adalah pencairan dana bertahap sesuai dengan progres usahanya. Biasanya pencairan dapat dilakukan pada saat itu juga atau secara bertahap.

Pengawasan Pembiayaan Mudharabah

Pengawasan pembiayaan adalah tindakan pengawasan dalam pengelolaan pembiayaan yang dimulai sejak pemberian pembiayaan hingga pembiayaan dilunasi oleh nasabah.

Pengembalian Pembiayaan Mudharabah

Sistem pengembalian dapat dilakukan dengan cara membayar sejumlah modal atau dana yang telah diberikan Bank BSI. Di mana pembayaran tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Pokok ditambah dengan bagi hasil yang dibayar setiap bulan setelah pembiayaan dicairkan.
- b. Membayar pokok dan setiap bulan dengan bagi hasil dikeluarkan setelah masa kontrak pembiayaan selesai.

Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah

Setiap tahapan proses pembiayaan mudharabah senantiasa dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini disebabkan karena pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk Bank BSI yang mengandung risiko yang akan merugikan bank dan dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat penyimpan dana dan para pengguna jasa perbankan lainnya, walaupun dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Kriteria mudharib yang dianggap layak menerima pembiayaan mudharabah sebagai berikut: (Orlando & Susanto, 2019)

1. Melengkapi data-data yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan mudharabah.
2. Bisnis Mudharib ini sejalan dengan target pasar yang ditetapkan oleh Bank BSI Tbk KC Padang, yaitu:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan Bank BSI.
 - b. Tidak merupakan debitur pinjaman pembiayaan macet sesuai dengan informasi Bank Indonesia dan Bank BSI.
 - c. Tidak masuk ke dalam jenis usaha yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai.
3. Apabila calon mudharib telah menjadi nasabah, selama berhubungan dengan Bank BSI mempunyai reputasi baik.

4. Analisis rasio keuangan calon mudharib sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank BSI.
5. Nilai agunan/jaminan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan serta memiliki nilai *marketability*.

SIMPULAN

Ada beberapa prosedur dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang ditetapkan oleh bank BSI sebagai berikut: permohonan pengajuan pembiayaan mudharabah, analisis pembiayaan mudharabah, keputusan pembiayaan mudharabah, akad pembiayaan mudharabah, pencairan pembiayaan mudharabah, pengawasan pembiayaan mudharabah dan pengembalian pembiayaan mudharabah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, A., & Susanto, R. (2019). *Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*. 1–11. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yj9kb>
- Bishnoi, T. R., & Devi, S. (2017). Profitability. *Banking Reforms in India*, 3, 165–185. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55663-5_6
- Budiasih, Y. (2012). Struktur Organisasi, Desain Kerja, Budaya Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Karyawan. *Jurnal Liquidity*, 1(2), 99–105.
- Eny Widiaty, A. P. N. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah*.
- Maryana. (2012). *Pengaruh Capital Adequency Ratio (CAR) Dan Biaya Operasional Pendapatan (Bopo) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2000 – 2012*. 1, 13.
- Orlando, A., & Susanto, R. (2019). *Mekanisme Pencairan Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Unit Lubuk Buaya*. 1–10. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zuv2y>
- Putra, Y. E., & Susanto, R. (2018). *Bagian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan*. 10, 1–8.
- Rahman, S. I. R. D. A. (2011). Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk , Cabang Bogor. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 11(NO. 1).
- Sari, M., & Afriyeni, A. (2019). *Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Bni) Syariah, Tbk Cabang Padang*. 72, 1–14. <https://doi.org/10.31219/osf.io/anpux>
- Sari, Y. R., & Susanto, R. (2020). Aktivitas Penghimpun Dana Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan. *Ideas*, 2(1), 1–14.

- Stie, D., Dharma, T., & Makassar, N. (2008). *Analisis Sistem Perbankan Syari' Ah Di Indonesia*. 21, 167–179.
- Surakarta, S. (n.d.). *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia Agus Marimin 1, Abdul Haris Romdhoni 2, dan Tira Nur Fitria 3 STIE-AAS Surakarta* 2. 75–87. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/30/29>
- Widayati, R., & Andani, M. N. (2019). *Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada Bank Nagari Cabang Siteba*. 1–11. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fgc4r>
- Widayati, R., & Maiwati, S. (2019). *Aktivitas Pemberian Kredit Komersil Pada Bank Nagari Cabang Sijunjung*. 1–12. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fnxaj>
- Widayati, R., & Putri, D. E. (2019). *Pelaksanaan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Lpn Pasar Baru Durian Sawahlunto*. 1–13. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jw2za>